

**ANALISIS KINERJA KANTOR PENGELOLAAN PASAR NITEN DALAM
PENGOPTIMALAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013**

Ringkasan Skripsi



Oleh:

AGUNG SIGIT NUGRAHANTO

07401244018

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2014

**ANALISIS KINERJA KANTOR PENGELOLAAN PASAR NITEN
DALAM PENGOPTIMALAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2013**

Oleh :

Agung Sigit Nugrahantodan Dr. Suharno, Msi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan, kinerja dan strategi Kantor Pengelolaan Pasar Niten serta mengetahui tanggapan pedagang Pasar Niten tentang kinerja Kantor Pengelolaan Pasar Niten dalam pengoptimalan retribusi pasar di Kabupaten Bantul tahun 2013.

Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan subyek penelitian menggunakan metode *purposive*. Subjek penelitian dalam penelitian ini antara lain: 1) Lurah Pasar Niten 2) Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul 3) Pedagang Pasar Niten. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi yang diuji keabsahannya dengan tehnik *cross check*. Teknik analisis data menggunakan analisa induktif dengan tahapan berupa reduksi, kategorisasi, display data dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kantor Pengelolaan Pasar Niten sangat berperan dalam mengoptimalkan retribusi Pasar Niten. Peran tersebut berupa pengumpulan dana dari pungutan retribusi pasar dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pungutan retribusi pasar. Dengan menerapkan tarif retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar. 2) Kinerja Kantor Pengelolaan Pasar Niten dapat dilihat dari lima indikator yaitu kualitas, kuantitas, kejasama, inisiatif serta kehandalan. Dari indikator kualitas, kerjasama, inisiatif serta kehandalan sudah berjalan dengan baik. Tetapi dari segi kuantitas masih belum maksimal hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan dari selisih antara realisasi penerimaan retribusi Pasar Niten dengan target penerimaan retribusi. 3) Strategi Kantor Pengelolaan Pasar Niten dalam Mengoptimalkan Retribusi Pasar dilakukan dengan cara *pertama* Penertiban sistem administrasi pungutan retribusi dengan baik. Strategi yang *kedua* pembagian tugas dan pelatihan kepada pedagang dan strategi yang ketiga adalah meningkatkan sistem evaluasi dan pengawasan. 4) Tanggapan pedagang pasar Niten tentang kinerja Kantor Pengelolaan Pasar di Pasar Niten. a) Para pedagang dan pembeli sudah merasa cukup dengan pelayanan maupun penyediaan fasilitas yang ada di Pasar Niten. b) Penarikan retribusi sudah berjalan dengan baik, baik pelayanan yang diberikan dalam mengurus surat ijin menjadi pedagang cukup mudah. c) Petugas pungut tidak pernah melakukan aksi pemaksaan maupun kekerasan dalam proses pemungutan retribusi. d) Kerjasama pegawai dengan pedagang dalam pemungutan juga berjalan baik.

Kata kunci: **analisis kinerja, retribusi pasar**

I. Pendahuluan

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka daerah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dalam membiayai rumah tangganya sendiri serta untuk pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu peningkatan sumber pendapatan daerah dipandang sebagai salah satu cara yang efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sumber-sumber pendapatan daerah yaitu: Pendapatan Asli Daerah, Pinjaman Daerah; dan lain-lain Pendapatan. Sedangkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti yang tertuang pada poin 1 terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Berdasarkan pasal tersebut berarti Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki peranan yang potensial sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan oleh masing-masing daerah dan selanjutnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi pasar. Retribusi pasar ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Retribusi pasar memberikan banyak manfaat baik untuk pengguna pasar maupun untuk pemerintah daerah itu sendiri. Manfaat retribusi bagi para pengguna pasar antara lain untuk

memenuhi serta meningkatkan pelayanan dalam hal penyediaan, penggunaan dan perawatan fasilitas pasar yang berupa halaman atau pelataran, kios dari pemerintah. Sedangkan manfaat retribusi pasar untuk pemerintah daerah adalah sebagai salah satu sumber pemasukan retribusi daerah yang cukup potensial untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Retribusi daerah menurut Munawir (1980: 4) didefinisikan sebagai "iuran rakyat kepada Pemerintah berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapatkan jasa balik atau kontra prestasi dari Pemerintah secara langsung dan dapat ditunjuk". Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan: "Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan".

Salah satu komponen retribusi daerah adalah retribusi pasar. Retribusi pasar termasuk dalam jenis retribusi jasa umum karena bersifat bukan pajak dan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, artinya retribusi pasar dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial (Suryani, 2009: 70). Retribusi pasar adalah retribusi atas fasilitas pasar tradisional yang berupa pelataran atau los yang dikelola oleh pemerintah daerah yang khusus disediakan oleh pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan daerah pasar (Kesit, Bambang, 2005: 135).

Pemerintah diharapkan dapat menggali potensi retribusi pasar semaksimal mungkin sebagai sumber keuangan penyelenggaraan pembangunan daerah. Pasar adalah salah satu fasilitas bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Dengan adanya pasar akan terjadi suatu perputaran uang yang menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat. Pemerintah Daerah harus cepat mengidentifikasi sektor-sektor potensial

PAD sebagai motor penggerak pembangunan daerah. Sektor-sektor potensial yang dimiliki pemerintah kabupaten Bantul salah satunya melalui retribusi sektor pasar karena selama ini Kabupaten Bantul dikenal sebagai Kabupaten yang melindungi perdagangan dan pasar tradisional. Kebijakan pembangunan perdagangan di Kabupaten Bantul diprioritaskan juga pada perlindungan dan pengembangan pasar tradisional.

Pasar Tradisional di Kabupaten Bantul menjadi penggerak utama roda perekonomian dalam suatu kawasan atau wilayah, baik di desa maupun kecamatan. Hal ini harus diakui bahwa sekitar 14% warga masyarakat di Kabupaten Bantul sangat menggantungkan hidupnya di Pasar Tradisional tersebut. Akses *mall* dan toko-toko modern dibatasi sedemikian rupa sehingga pedagang-pedagang tradisional di Kabupaten Bantul bisa menggerakkan roda perekonomiannya dengan baik (bappeda.bantulkap.go.id).

Bencana alam gempa bumi yang melanda wilayah Yogyakarta termasuk Kabupaten Bantul pada tanggal 27 Mei 2006 lalu telah meruntuhkan segala sendi kehidupan baik sosial, ekonomi maupun politik. Aspek ekonomi yang sangat mendukung keberlangsungan masyarakat Bantul ikut terpuruk baik dari sektor pariwisata maupun perdagangan. Salah satu yang mengalami kerusakan parah dari segi perdagangan adalah bangunan pada Pasar Niten yang mengalami kerusakan cukup parah, sehingga hal tersebut mempengaruhi roda perekonomian warga Bantul. Pasar Niten adalah salah satu dari pasar tradisional yang ada di Kabupaten Bantul yang mengalami kerusakan.

Untuk memulihkan kondisi semula maka Pemerintah Daerah Bantul berupaya untuk merelokasi dan membangun Pasar Niten, sehingga menjadi sebuah pasar yang baru, yang letaknya di lokasi pasar yang telah hancur (Pasar Niten Lama) dan roboh akibat gempa bumi dipindah ke arah utara kurang lebih 1 km. Pasar Niten Baru dibangun dengan menghabiskan dana kurang lebih sekitar Rp.18,9 Milyar dan dibangun diatas

tanah kas Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, dengan luas bangunan sekitar 3 ha, termasuk bangunan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Pasar Niten dapat menampung seluruh pedagang pasar lama ditambah sejumlah pedagang baru yang kesemuanya saat ini berjumlah 350 pedagang, baik yang berada di kios, los maupun Arahana (plataran).

Berdasarkan waktunya pasar ini termasuk pasar harian, karena pasar Niten ini berlangsung hampir setiap hari, namun puncak keramaian pasar ini hanya pada waktu pagi hari dan dibagian pasar klitikan pada waktu malam hari. Pasar Niten mempunyai 2 bagian, yaitu; 1) bagian pasar umum untuk pedagang barang kebutuhan sehari-hari, 2) bagian pasar Klithikan untuk para pedagang yang berjualan barang setengah pakai.

Bagian pasar umum terdapat 3 bagian untuk para pedagang yaitu untuk pedagang kios, los dan plataran. Barang atau komoditi penjualan pada bagian pedagang los terdiri dari; sebelah selatan meliputi tempe/ tahu, kembang/ jamu, ikan laut, daging sapi/ ayam, ratengan/ makanan dan sebelah utara meliputi pakaian, buah-buahan, barang pecah belah, klontong, sembako dan snack/ makanan kecil. Sedangkan pada area kios meliputi barang sembako, bank dan toko plastik. Area plataran ditempati oleh pedagang yang tidak punya tempat menetap untuk berjualan di pasar niten tapi bisa masuk ke dalam area pasar niten seperti penjual es dawet keliling. Sedangkan bagian Pasar Klitikan menjual berbagai barang-barang elektronik, onderdil motor serta terdapat reparasi jam.

Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul adalah badan yang diberi kewenangan untuk mengelola 31 pasar yang tersebar di seluruh Kabupaten Bantul termasuk salah satunya adalah Pasar Niten. Setiap staf pengelola pasar yang bertugas di setiap pasar di Kabupaten Bantul berada di bawah naungan Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul. Dalam menjalankan pemungutan retribusi di Pasar Niten, Kantor Pengelolaan Pasar menugaskan petugas pungut dan staf administrasi yang berkoordinasi langsung dengan Sub Bagian Unit Pelaksana Teknis (UPT) I. Tugas dari petugas pungut

dan staf administrasi yang bertugas di Pasar Niten adalah melakukan pemungutan retribusi sesuai dengan ketentuan Dinas Pengelolaan Pasar yang berpedoman pada Peraturan Daerah No. 17 tahun 2012 tentang pengelolaan pasar.

Adanya kebijakan tentang pembatasan pendirian *mall* dan toko-toko modern ini menuntut adanya perbaikan pengelolaan pasar tradisional, seperti pembangunan fasilitas belanja bagi masyarakat yang nyaman, terjangkau dan tetap mempertahankan unsur pasar tradisional. Kebijakan pembatasan *mall* dan toko-toko modern jelas menuntut konsekuensi agar Pemda Bantul memberi kompensasi pengelolaan pasar tradisional yang lebih baik. Pada tahun 2011 pasar tradisional di Kabupaten Bantul berjumlah 32 unit. Sementara itu jumlah pasar desa tetap 27 unit dan pasar seni juga tidak bertambah. Potensi pasar kabupaten yang cukup memadai untuk menuju pasar tradisional yang modern. Di Kabupaten Bantul ada empat pasar yang menuju konsep pasar tradisional yang modern yaitu pasar Bantul, pasar Imogiri, pasar Niten, dan pasar Piyungan. Sektor pasar ini mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul dan memberikan kontribusi sebesar Rp 1,210,959,350.00 pada tahun 2009 terhadap PAD Kabupaten Bantul dan terus meningkat sebesar 1,898,948,000.00 pada tahun 2012 seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel I
Realisasi PAD Retribusi Pelayanan Pasar tahun 2009-2012

Tahun	Target	Realisasi	%
2009	1,093,117,300	1,210,959,350.00	110%
2010	1,319,309,770	1,380,238,150.00	104%
2011	1,377,201,500	1,426,345,000.00	103%
2012	1,400,000,000	1,898,948,000.00	135%

Sumber : DPPKAD Bantul

Meski terus mengalami peningkatan pendapatan, masih terdapat berbagai kendala, antara lain manajemen pasar yang belum optimal dan permasalahan yang

disebabkan oleh munculnya rentenir yang menjanjikan uang dengan banyak kemudahan dengan konsekuensi bunga yang melebihi standar. Permasalahan tersebut sudah mulai diatasi melalui pinjaman modal dengan bunga lunak tanpa agunan yang dilaksanakan melalui sistem pinjaman bergulir (*revolving fund*). Pada tahun 2013 dalam APBD Murni dianggarkan 3,6 milyar untuk pengembangan dana bergulir bagi pedagang pasar. Hal ini dimaksudkan untuk penguatan modal usaha bagi pedagang di pasar yang kekurangan modal. Selama ini para pedagang yang kekurangan modal usaha pinjam ke rentenir dengan bunga yang cukup tinggi, dengan adanya dana bergulir ini diharapkan para pedagang tidak lagi pinjam ke rentenir (<http://pasar.bantulkab.go.id>).

Pada pelaksanaannya pemberian dana bergulir ini masih terkesan menyulitkan pedagang. Hal ini disebutkan pada pasal 8 poin 2 dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Mekanisme Pencairan, Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir Bagi Pedagang Pasar Tradisional Di Kabupaten Bantul disebutkan bahwa Lurah Pasar dan petugas dana bergulir memverifikasi dan menyeleksi permohonan pedagang pasar. Artinya tidak semua pedagang dapat menerima pinjaman bergulir ini, sehingga kesempatan para rentenir untuk mendekati pedagang masih terbuka.

Kegiatan promosi yang dilakukan oleh Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul untuk menarik pembeli dan mensejahterakan pedagang di pasar-pasar tradisional diantaranya dengan mempromosikan pasar tradisional ke publik, seperti dengan mengadakan pertunjukan hiburan tradisional di lingkungan Pasar tradisional. Akan tetapi pelaksanaan promosi seperti ini pelaksanaannya belum secara masif, promosi pasar dilakukan hanya untuk pasar yang baru direnovasi. Seharusnya promosi dilaksanakan secara berkelanjutan agar pasar tradisional semakin melekat dihati masyarakat.

Pasar Niten adalah salah satu dari pasar tradisional di Kabupaten Bantul yang dikelola oleh kantor pengelolaan pasar yang bergaya modern dengan fasilitas yang

memadai. Pasar ini dibangun dengan menghabiskan dana kurang lebih sekitar Rp. 18,9 Milyar. Pada tahun 2011 ada 926 pedagang yang ada di pasar tersebut, baik yang berada di kios, los maupun arahan/plataran. Adanya pasar bergaya modern dan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai tidak serta merta membuat para pedagang merasa nyaman. Hasil pra observasi penulis di lapangan membuktikan masih terdapat beberapa los di Pasar Niten yang masih kosong. Kekosongan los ini membuktikan bahwa dengan adanya perbaikan berbagai sarana ini belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh para pedagang. Alasan kekosongan los ini menurut para pedagang dikarenakan area Pasar Niten yang sangat luas, sehingga para pedagang tidak mau memakai los yang dinilai kurang strategis.

Selain perbaikan fasilitas pasar tradisional Peraturan Daerah No. 17 tahun 2012 tentang pengelolaan pasar juga mengatur jarak antara pasar modern dengan pasar tradisional, jam buka, program pasar sehat dan nyaman, promosi pasar tradisional, pemberian bantuan dana bergulir dan perbaikan infrastruktur pasar ternyata belum mampu memenuhi target realisasi pendapatan dari sektor retribusi pasar. Program pasar sehat diupayakan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk membuat kesan pasar tradisional yang semula kumuh menjadi nyaman seperti mengunjungi pasar modern, sehingga banyak masyarakat yang memilih belanja di pasar tradisional.

Target pendapatan pasar Niten pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 173.781.000,- dan telah terealisasi secara keseluruhan mencapai sebesar Rp. 34.372.800,- sampai dengan akhir Bulan Maret 2011. Pada tahun 2012 target pendapatan pasar sebesar Rp. 179.675.000,- dan realisasinya sebesar 175.631.000,-. Adanya perbedaan target dengan realisasi penerimaan retribusi tersebut, dimana realisasi penerimaan retribusi pasar tidak mencapai target, hal ini mengidentifikasikan terdapat permasalahan di dalam kinerja

Kantor Pengelolaan Pasar yang kurang optimal sehingga pendapatan retribusi pasar belum memenuhi apa yang telah ditargetkan.

Berdasarkan penjelasan dan permasalahan yang dijelaskan di atas, peneliti memfokuskan untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Kantor Pengelolaan Pasar Niten dalam Pengoptimalan Retribusi Pasar di Kabupaten Bantul 2013”.

II. Kajian Teori

A. Tinjauan Tentang Kinerja

1. Pengertian Tentang Kinerja

Membahas mengenai masalah kinerja tentu tidak terlepas dari proses, hasil dan daya guna. Dalam hal ini kinerja (prestasi kerja) merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Definisi kinerja organisasi yang dikemukakan oleh Bastian dalam Tangkilisan (2005: 175) sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tersebut.

2. Penilaian Kinerja

Tercapainya tujuan lembaga merupakan salah satu wujud dari keberhasilan sebuah lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tetapi keberhasilan tersebut tidak dapat dilihat begitu saja, diperlukan penilaian terhadap kinerja lembaga tersebut. Penilaian kinerja atau penilaian prestasi kerja tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan poses kegiatan manajemen SDM. Dwiyanto (2006: 47) menjelaskan bahwa penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran suatu organisasi dalam mencapai visinya.

3. Analisis Kinerja

Analisis kinerja menurut Robbins (1996: 20) dapat di ukur, melalui lima indikator yaitu: Kualitas, Kuantitas, Kerjasama, Inisiatif dan Kehandalan/tanggungjawab. Dalam konteks penelitian yang akan dilakukan, maka pengertian analisis kinerja merupakan proses pengumpulan informasi tentang bagaimana tingkat kemampuan pencapaian hasil kerja yang dilakukan oleh pegawai di Kantor Pengelolaan Pasar Niten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi sehingga tujuan lembaga akan tercapai.

B. Tinjauan tentang Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut Undang-undang No 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud pemerintahan daerah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

2. Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Hak Pemerintah Daerah menurut Marbun (2005: 115) antara lain meliputi, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih pemimpin daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak daerah dan retribusi daerah, dan lain-lain. Sedangkan kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan penjelasan dari Marbun, (2005:115-116) adalah; Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI, Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, Mengembangkan kehidupan demokrasi ,Mewujudkan

keadilan dan pemerataan, Mengembangkan sumber daya produktif di daerah, Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, Melestarikan nilai sosial budaya, dan lain sebagainya

3. Susunan Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

4. Perangkat Daerah

Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintahan daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. Susunan organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

5. Pengertian Otonomi Daerah

Menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Pelaksanaan Otonomi Daerah

Undang-undang No 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah paradigma sentralisasi pemerintahan ke arah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab kepada daerah perubahan paradigma

tersebut juga merupakan kesempatan yang penting bagi Pemerintah Daerah untuk membuktikan kesanggupannya dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan lokal sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat lokal. Hal ini perlu diantisipasi, agar kinerja Pemerintah Daerah dapat meningkat secara signifikan dalam mengurus rumah tangga daerah dan pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kapasitas Perangkat Daerah dan DPRD (Widjaja, 2007:17-19).

7. Prinsip Otonomi Daerah

- a. Otonomi daerah itu harus riil atau nyata, dalam arti bahwa pemberian otonomi kepada daerah harus didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan-perhitungan dan tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan yang benar-benar dapat menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri.
- b. Otonomi daerah itu harus merupakan otonomi yang bertanggung jawab, dalam arti bahwa pemberian otonomi itu harus benar-benar sejalan dengan tujuannya, yaitu meluncurkan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok Negara dan serasi atau tidak bertentangan dengan pengarah-pengarah yang diberikan di dalam GBHN, serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa, menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah atas dasar keutuhan Negara Kesatuan serta dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah.
- c. Otonomi daerah itu lebih merupakan kewajiban daripada hak.
- d. Urusan otonomi daerah tidaklah statis, tetapi berkembang dan berubah. Hal ini disebabkan oleh keadaan yang timbul dan berkembang di daerah masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, Undang-undang memberikan kemungkinan untuk secara bertahap menambah penyerahan urusan-urusan kepada daerah dan sebaliknya dimungkinkan pula penarikan kembali sesuatu urusan rumah tangga daerah,

bahkan mungkin pula adanya penghapusan suatu daerah dan pembentukan daerah-daerah baru.

8. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Otonomi Daerah

Menurut pendapat dari Kaho (2007: 244), agar dapat melaksanakan tugas otonomi daerah dengan sebaik-baiknya ada beberapa faktor yang perlu mendapat perhatian. Faktor-faktor tersebut dibuat berdasarkan dari penjelasan Iglesias tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah sebagai berikut: manusia pelaksananya harus baik, keuangan harus cukup baik, peralatan harus cukup baik dan organisasi serta manajemen harus baik

C. Tinjauan tentang Pendapatan Daerah

1. Pengertian Pendapatan Daerah

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2004:94), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Tinjauan tentang Pasar Tradisional

Definisi pasar tradisional digunakan untuk menunjukkan tempat bagi perdagangan pasar yang asli setempat (*indigeneous native*) yang sudah berlangsung sejak lama. Suatu pasar yang baru dibangun 10 tahun terakhir, misalnya, dapat

dimasukkan dalam jenis pasar tradisional karena perdagangannya menggunakan cara-cara tradisional (Pamardi, dalam Aliyah dkk 2007: 112)

Ciri dari pasar tradisional antara lain (Kholis, 2011:20): 1) Dalam pasar tradisional tidak berlaku fungsi-fungsi manajemen: *Planning, Organizing, Actuating, Controlling*; 2) Tidak ada konsep *marketing*, yaitu: Bahwa pembeli adalah raja, terdapat pelayanan penjualan; Penentuan harga berdasarkan perhitungan harga pokok ditambah keuntungan tertentu, Produk berkualitas, Tempat penjualan yang nyaman bagi pembeli.

E. Tinjauan tentang Retribusi Pasar

Menurut Sunarto (2005: 21) retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan pada pedagang oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian tempat-tempat berupa took / kios, counter/ los, dasaran, dan halaman pasar yang disediakan di dalam pasar daerah atau pedagang lain yang berada di sekitar pasar daerah lainnya yang berada di sekitar pasar daerah sampai dengan radius 200 meter dari pasar tersebut.

Klasifikasi retribusi pasar menurut Goedhart (dalam Marselina, 2013: 8) antara lain: Menurut sifat prestasi Negara, Menurut cara menentukan jumlah pungutan dan Menurut cara pembayaran.

Faktor-faktor yang mempengaruhi retribusi pasar menurut Soejamto (dalam Marselina, 2013:8) adalah sebagai berikut :Subyek dan obyek retribusi, tarif retribusi, sistem pemungutan retribusi.

III. Metode Penelitian

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di dua lokasi di Kabupaten Bantul, yaitu di Pasar Niten dan Kantor Pengelolaan Pasar Bantul, yaitu pada bulan Januari sampai April 2014.

B. Subjek Penelitian

Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive, yaitu penentuan subjek penelitian dengan pertimbangan dan tujuan tertentu(Sugiyono, 2009:216). Subjek penelitian antara lain; Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul, Lurah Pasar Niten dan pedagang Pasar Niten.

C. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa kata-kata tertulis dan lisan.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan data

Pemeriksaan Keabsahan Data dalam penelitian ini menggunakan teknik *cross check*. Teknik *cross check* digunakan karena penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi sehingga peneliti mengecek data yang berasal dari wawancara dengan dokumentasi.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik reduksi, kategorisasi, display data dan pengambilan kesimpulan.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peranan Kantor Pengelolaan Pasar Niten

- a. Melakukan renovasi pasar.
- b. Alokasi peran pelaku ekonomi.

- c. Menerapkan tariff retribusi sesuai Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar untuk semua pedagang yang ada di dalam kompleks Pasar Niten.
- d. Mengajukan permohonan penguatan modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
- e. Mengadakan kegiatan promosi.

2. Kinerja Kantor Pengelolaan Pasar Niten

Pengelola Pasar Niten menjalankan tugasnya masing-masing dalam meningkatkan retribusi pasar disesuaikan dengan wilayahnya yaitu zona sayur, zona daging dan zona kelontong. Petugas Pengelola Pasar Niten terdiri dari: Lurah Pasar Niten (Koordinator Pasar), Petugas Pemungut, Petugas Kebersihan, Petugas Keamanan dan Staf Administrasi.

Kinerja Kantor Pengelolaan Pasar Niten dapat diukur dengan 5 indikator, antara lain sebagai berikut:

a. Kualitas Kinerja Kantor Pengelolaan Pasar Niten

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, kualitas pengelolaan Pasar Niten sudah berjalan dengan baik sesuai dengan SOP yang diberlakukan oleh Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul. SOP pemungutan retribusi pasar Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima dan merekap pembayaran retribusi pasar dari pedagang;
- 2) Memverifikasi dan menyusun rekapitulasi penerimaan retribusi dari semua petugas pungut dan melaporkan kepada lurah pasar;
- 3) Menerima, memverifikasi, dan melaporkan laporan rekapitulasi penerimaan retribusi serta melaporkan kepada kepala UPT;
- 4) Menerima dan mencocokkan dokumen kelengkapan laporan rekapitulasi retribusi seluruh pasar dan melaporkan ke bendahara penerimaan;
- 5) Proses selanjutnya ada di bendahara penerimaan dan disetorkan setiap hari kecuali hari sabtu dan tanggal merah ke Kas daerah BPD.

Pengelolaan pasar di Pasar Niten berada di bawah kontrol dari Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul. Hal ini berarti dalam pengelolaan

retribusi pasar di Pasar Niten menerapkan standar yang sama dengan pasar-pasar lain di Kabupaten Bantul. Pemanfaatan dari hasil retribusi seperti pengadaan maupun pembenahan fasilitas pasar yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar masih dilaksanakan berdasarkan penyediaan dana dari kas daerah.

b. Kualitas Kinerja Kantor Pengelolaan Pasar Niten

Berkaitan dengan pengelolaan retribusi pasar maka staf retribusi Pasar Niten memiliki tugas pokok dalam melaksanakan penyusunan target penerimaan pendapatan pasar, intensifikasi pemungutan, pengawasan, penyetoran, dan pelaporan realisasi penerimaan pendapatan pasar. Retribusi pasar terdiri dari retribusi izin penempatan, retribusi kios, retribusi los, retribusi dasaran, dan retribusi tempat parkir. Pada dasarnya Dinas Pengelolaan Pasar tidak mengelola secara langsung penerimaan retribusi pasar tersebut karena Dinas Pengelolaan Pasar hanya diberi kewenangan teknis operasional untuk menyerahkan dan melaporkan secara bertanggung jawab hasil penerimaan itu kepada Pemerintah Kabupaten sebagai kas daerah. Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan data bahwa jumlah realisasi penerimaan retribusi Pasar Niten pada tahun 2013 tidak sesuai dengan target pendapatan retribusi Pasar Niten. Target pendapatan Pasar Niten sebesar Rp 234.378.500 dan realisasinya sebesar Rp 213.204.800, sehingga ditemukan selisih Rp 21.173.700.

c. Kerjasama

Dalam Kantor pengelolaan pasar, setiap pegawai saling bekerja sama dengan adanya pembagian wewenang dalam pekerjaan. Pembagian wewenang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi dari bidang pengelolaan pasar yang termuat dalam Perda (Peraturan Daerah) dan Perbup (Peraturan Bupati). Menurut Lurah Pasar Niten setiap pegawai telah menjalankan tugasnya

masing-masing dengan baik dan selalu berkordinasi andaikata dalam penyelesaian tugas yang ada di pasar terbentur suatu masalah. Bila tidak dapat diselesaikan di Pasar Niten, maka akan diselesaikan di Dinas Pengelolaan Pasar Bantul

d. Inisiatif

Inisiatif yang dilakukan pegawai antara lain setiap 1 (satu) bulan sekali ada suatu evaluasi/koordinasi, baik dari segi pendapatan, keamanan, maupun dari petugas pasar tentang kemajuan dan kekurangan yang ada di pasar Niten, baik itu administrasi maupun pendapatan dan sebagainya. Koordinasi rutin dijadwalkan 1 (satu) bulan sekali. Koordinasi seluruh pasar yang ada di Kabupaten Bantul tiap 3 (tiga) bulan sekali yang diadakan di Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas pemungutan, petugas pungut mendatangi pedagang satu persatu agar lebih efektif. Petugas pungut tidak pernah melakukan aksi pemaksaan maupun kekerasan dalam pemungutan retribusi. Inisiatif yang dilakukan petugas, apabila ada pedagang belum bisa membayar retribusi pada saat itu juga, maka retribusi tersebut bisa dilakukan dikemudian hari.

e. Kehandalan/Tanggungjawab

Menurut lurah pasar Niten, pelayanan yang diberikan untuk para pedagang sudah baik seperti menyediakan sarana prasarana dan berbagai fasilitas di Pasar, melakukan pemungutan retribusi kepada para pedagang dengan transparan dan melakukan sosialisasi Peraturan Daerah tentang tata tertib dan pemberdayaan pedagang terhadap para pedagang setiap 3 (tiga) bulan sekali. Pemerintah memberikan fasilitas kavlingan kios, los, dan pelataran (operan) di Pasar Niten Bantul.

3. Strategi Kantor Pengelolaan Pasar Niten

a. Aspek Administrasi

Untuk memperlancar kegiatan administrasi tersebut diperlukan pelaksanaan yang baik. Pelaksanaan administrasi di Pasar Niten Bantul meliputi: Ijin Permakaian Tempat Berjualan di Pasar; Proses Pemungutan dan Proses Pembukuan.

b. Aspek Personal

Dalam melakukan pemungutan retribusi di Pasar Niten, petugas pungut mendatangi para pedagang secara langsung yang menempati kios, los dan lapak. Dalam menjalankan tugasnya petugas pungut memungut retribusi sesuai dengan pembagian blok yang telah ditentukan. Petugas pungut adalah orang yang bertugas memungut retribusi kepada seluruh pedagang di pasar. Petugas pungut dibantu dengan seorang staf administrasi yang merangkap menjadi petugas pungut.

c. Aspek Evaluasi dan Pengawasan

Aspek evaluasi dan pengawasan di Pasar Niten dilakukan sama dengan pasar-pasar lain di Kabupaten Bantul sesuai dengan standar yang diberikan oleh Dinas Pengelolaan Pasar. Evaluasi yang diberlakukan meliputi:

- 1) Evaluasi/koordinasi yang dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali, untuk evaluasi pendapatan maupun keamanan pasar; tentang kemajuan dan kekurangan yang ada di Pasar Niten, baik administrasi, pemungutan retribusi, dan pendapatan,
- 2) Setiap 3 (tiga) bulan sekali yaitu koordinasi di Kabupaten Bantul bersama seluruh petugas pengelolaan pasar.

4. Tanggapan Pedagang Pasar Niten Tentang Kinerja Kantor Pengelolaan Pasar Niten

Dalam mengoptimalkan akan retribusi pasar. Pedagang merupakan pihak yang berperan penting dalam memajukan pasar. Dengan semakin berkembangnya pasar maka akan semakin ramai pula pengunjungnya dan dapat memajukan perekonomian pasar tersebut. Semakin majunya perekonomian di pasar, pedagang pasar akan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan di pasar. Pengoptimalan retribusi pasar dapat didukung dengan kesesuaian para pedagang dalam membayar retribusi sesuai dengan nominal yang ditentukan. Sebagai pengguna pasar, pedagang secara langsung merasakan pelayanan, fasilitas-fasilitas serta penerapan pemungutan retribusi yang dilakukan Kantor Pengelolaan Pasar Niten. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pasar Niten, pada umumnya pedagang sudah merasa cukup dengan pelayanan, penyediaan fasilitas serta pungutan retribusi oleh Kantor Pengelolaan Pasar Niten. Tetapi beberapa pedagang mengeluhkan masalah terkait dengan pelayanan fasilitas serta pemungutan retribusi pasar. Penilaian pedagang Pasar Niten dalam kinerja Kantor Pengelolaan Pasar Niten dapat dilihat dari aspek kualitas, kuantitas, inisiatif, kerjasama, dan kehandalan/tanggungjawab

V. Penutup

A. Kesimpulan

1. Kantor Pengelolaan Pasar Niten sangat berperan dalam mengoptimalkan retribusi Pasar Niten. Peran tersebut berupa pengumpulan dana dari pungutan retribusi pasar dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pungutan retribusi pasar. Dengan menerapkan tarif retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar.
2. Kinerja Kantor Pengelolaan Pasar Niten dapat dilihat dari lima indikator yaitu kualitas, kuantitas, kerjasama, inisiatif serta kehandalan. Dari indikator kualitas, kerjasama, inisiatif serta kehandalan sudah berjalan dengan baik. Tetapi dari segi kuantitas masih belum maksimal hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan dari selisih antara realisasi penerimaan retribusi Pasar Niten dengan target penerimaan retribusi
3. Strategi Kantor Pengelolaan Pasar Niten dalam Mengoptimalkan Retribusi Pasar dilakukan dengan cara *pertama* Penertiban sistem administrasi pungutan retribusi

dengan baik. Strategi yang *kedua* pembagian tugas dan pelatihan kepada pedagang dan strategi yang ketiga adalah meningkatkan sistem evaluasi dan pengawasan.

4. Tanggapan pedagang pasar Niten tentang kinerja Kantor Pengelolaan Pasar di Pasar Niten. a) Para pedagang dan pembeli sudah merasa cukup dengan pelayanan maupun penyediaan fasilitas yang ada di Pasar Niten. b) Penarikan retribusi sudah berjalan dengan baik, baik pelayanan yang diberikan dalam mengurus surat izin menjadi pedagang cukup mudah. c) Petugas pungut tidak pernah melakukan aksi pemaksaan maupun kekerasan dalam proses pemungutan retribusi. d) Kerjasama pegawai dengan pedagang dalam pemungutan juga berjalan baik.

B. Saran

Dari kesimpulan yang di paparkan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah
 - a. Memperbaiki fasilitas yang ada di Pasar Niten dengan sebaik- baiknya. Jangan sampai ada beberapa fasilitas yang sudah diperbaiki namun masih juga mengalami kerusakan yang sama. Pembagian kios, los atau lapak di area Pasar Niten juga harus mendapat perhatian karena semakin banyaknya pedagang yang mengeluhkan bahwa dagangan mereka semakin sepi dan semakin banyaknya kios, los atau lapak yan tutup.
 - b. Melakukan pembenahan manajemen pengelolaan retibusi pasar dalam rangka meningkatkan pendapatan retibusi pasar, dengan cara melakukan pemungutan retribusi pasar secara terpadu dengan melibatkan aparatur pasar, menerapkan secara konsisten kebutuhan sumber daya manusia yang disesuaikan dengan beban kerja, menyediakan sarana dan prasarana kerja yang benar-benar dibutuhkan pegawai secara memadai, serta melakukan penerapan sanksi yang tegas kepada pegawai dan/ atau wajib retribusi yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.
2. Staf Pengelola Pasar Niten
 - a. Rutin melakukan sosialisai Perda tentang tata tertib dan pemberdayaan pedagang.
 - b. Lebih tegas dalam melakukan penarikan retribusi kepada para pedagang.
3. Pedagang

- a. Membayar retribusi pasar dan retribusi kebersihan tepat waktu dan sesuai dengan tarif yang ditentukan agar tidak banyak tunggakan yang memberatkan pedagang dan mengurangi jumlah pendapatan pemerintah dan retribusi.
- b. Menjaga dan merawat fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah Ist ijabatul dkk. Peran Pasar Tradisional Dal Am Mendukung Pengembangan Pariwisata Kota Surakarta. Jurnal GEMA TEKNIK - NOMOR 2/ TAHUN X JULI 2007
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Kaho, Josef. 2007. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Marbun. 2005. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Marselina B, Ega. Analisis Kontribusi Pajak Parkir Dan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota Padang. *Jurnal Akuntansi* Vol 1, No 1 (2013)
- Robbins, Stephen P. 1996. *Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*. Alih Bahasa : Hadyana Pujaatmaka. Edisi Keenam. Penerbit PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta
- Sunarto. 2005. *Pajak dan retribusi Daerah*. Yogyakarta: AMUS Yogyakarta dan Citra Pustaka
- Tangkilisan, Hessel Nogi S.. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka.
- Widjaja, Haw. 2007. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar.

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18

Undang-undang Republik Indonesia Nomer 22 Tahun 1999 tentang Pemeritahan Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintan No. 52.Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Presiden Republik Indonesia.